



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JL. HR. RASUNA SAID KAB. B2 LANTAI 10, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
TELEPON/FAX : (021)-50927412
www.bappenas.go.id

Nomor : 00217/PP.09.04/Dt.9.1/01/2022 Jakarta, 7 Januari 2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Verifikasi Laporan Triwulan IV TA 2021
pada Aplikasi e-Monev Berdasarkan PP 39/2006

Kepada Yth.

Kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga
(Terlampir)

Sehubungan dengan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Kementerian/Lembaga, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu di Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan pelaporan tepat waktu melalui Aplikasi e-Monev PP 39/2006 pada Triwulan III yang lalu. Bersama ini, kami sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan pelaporan dan proses verifikasi Triwulan IV TA 2021 melalui Aplikasi e-Monev:

1. Bahwa pelaporan PP 39/2006 Triwulan IV TA 2021 dapat dilakukan melalui Aplikasi e-Monev (<http://e-monev.bappenas.go.id>).
2. Berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan bahwa:
 - a. Penanggung Jawab Program (UKE I) bertanggung jawab untuk melakukan input data pada level: **Indikator Kinerja Program**.
 - b. Penanggung jawab kegiatan (UKE II) bertanggung jawab untuk melakukan input data pada level: **Komponen, Rincian Output Satker, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Kegiatan**.
 - c. Melakukan koordinasi kepada **satuan kerja** dibawahnya untuk melengkapi pelaporan level **Komponen dan Rincian Output Satker**.
3. Selanjutnya, setelah Triwulan berakhir, Kementerian/Lembaga (C.q: Biro Perencanaan) bertanggung jawab untuk melakukan **verifikasi** data yang telah dilaporkan oleh UKE II melalui Aplikasi e-Monev PP 39/2006. Masa verifikasi pada Triwulan IV TA 2021 adalah **30 Januari 2022**
4. Panduan penggunaan Aplikasi e-Monev dapat diunduh pada alamat berikut: https://e-monev.bappenas.go.id/fe/panduan/2021/Pedoman-e-Monev_2021_v1_19032021.pdf.
5. Apabila terdapat ketidaksesuaian data dan informasi pada Aplikasi e-Monev, maka dapat dilakukan perubahan dengan mengirimkan pembaharuan data kepada kami melalui Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga terkait.

Informasi lebih lanjut terkait aplikasi e-Monev dapat diperoleh dengan menghubungi kami:

**Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan**
JL. HR. RASUNA SAID KAB. B2 LANTAI 10, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
Telp/fax: 021-50927412
e-mail: laporan.pp39@bappenas.go.id

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Sistem dan Prosedur
Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan



Hari Dwi Korianto, S.Kom, M.Si
NIP. 196409081988011001

Tembusan Yth. :

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Kepada Yth Kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga.:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Mahkamah Agung;
5. Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Sekretariat Negara;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Hukum dan HAM;
11. Kementerian Keuangan;
12. Kementerian Pertanian;
13. Kementerian Perindustrian;
14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Kementerian Perhubungan;
16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Kementerian Kesehatan;
18. Kementerian Agama;
19. Kementerian Ketenagakerjaan;
20. Kementerian Sosial;
21. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
23. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
25. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
26. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
27. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
28. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
30. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
31. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
34. Badan Intelijen Negara;
35. Badan Siber dan Sandi Negara;
36. Dewan Ketahanan Nasional;
37. Badan Pusat Statistik;
38. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
39. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
40. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
41. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
42. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
43. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
44. Lembaga Ketahanan Nasional;
45. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
46. Badan Narkotika Nasional;
47. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
48. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
49. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
50. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
51. Komisi Pemilihan Umum;
52. Mahkamah Konstitusi;
53. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
54. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

55. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
56. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
57. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
58. Badan Informasi Geospasial;
59. Badan Standarisasi Nasional;
60. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
61. Lembaga Administrasi Negara;
62. Arsip Nasional;
63. Badan Kepegawaian Negara;
64. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
65. Kementerian Perdagangan;
66. Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
67. Komisi Pemberantasan Korupsi;
68. Dewan Perwakilan Daerah;
69. Komisi Yudisial;
70. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
71. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
72. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
73. Badan SAR Nasional;
74. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha;
75. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu;
76. Ombudsman Republik Indonesia;
77. Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
78. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
79. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
80. Sekretariat Kabinet;
81. Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
82. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
83. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
84. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85. Badan Keamanan Laut;
86. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
87. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban